

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP CHINA DALAM KONFLIK KASHMIR**

Sejak dahulu, China memang berdiri sebagai kekuatan besar dunia. Namun, setelah melewati banyak perubahan dan dinamika, China pun mulai merintis kembali kejayaannya. Kini, China muncul sebagai kekuatan baru yang mampu bersaing dan menjalankan peran layaknya seperti negara-negara adikuasa lainnya, baik dalam lingkup kawasan Asia maupun lingkup internasional. Bab ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap China untuk membantu India dan Pakistan dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir.

#### **4.1 Isu Stabilitas, Keamanan, dan Perdamaian Kawasan Asia Selatan**

Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang tidak pernah lepas dari konflik bilateral antara dua kekuatan besar dan berpengaruh dari kawasan ini, yaitu India dan Pakistan. Kedua negara telah terjebak selama lebih dari tujuh dekade dalam sebuah konflik yang kini semakin kompleks, yaitu konflik Kashmir. China awalnya juga hanya memainkan peran yang sangat minim dalam konflik ini, karena penyelesaian konflik ini lebih banyak ditangani oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Saat itu, China juga tidak mengklaim dirinya sebagai kekuatan besar dalam bidang politik ataupun militer dan manajemen krisis China masih sangat rendah (Haegeland, 2018). Namun seiring dengan reformasi dan tumbuhnya China sebagai negara yang besar dan berpengaruh, China semakin percaya diri memainkan perannya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian

kawasan Asia Selatan, terlebih lagi pasca krisis nuklir tahun 1998, konflik Kargil tahun 1999, dan peristiwa 9/11 yang menyebabkan sederet peristiwa terorisme (Fazal-ur-Rahman, 2009).

Sejak awal munculnya konflik Kashmir, atmosfer kawasan Asia Selatan jauh dari stabil dan aman. China pun telah menjadi salah satu bagian dari konflik ini dengan memainkan peran yang sangat minimal hingga mulai mengalami peningkatan sejak akhir abad ke-19. Ketika membandingkan peran Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Selatan, peran keduanya sama-sama meningkat. Tahun 1990-an, peran Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Asia Selatan tercermin dalam keterlibatannya dalam krisis India dan Pakistan. Sedangkan China sendiri masih memainkan peran minimal. Meningkatnya peran China dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan Asia Selatan dimulai sejak konflik Kashmir berujung pada uji coba nuklir India dan Pakistan pada tahun 1998 dan menjadikan kedua negara ini sebagai bagian dari kekuatan nuklir global. Hal ini sekaligus menyadarkan China bahwa krisis besar yang terjadi di kawasan ini tak hanya seputar sengketa wilayah, melainkan telah berkembang sebagai krisis nuklir yang membahayakan perdamaian kawasan dan juga stabilitas nuklir global. Dalam hal ini, China mulai meningkatkan perannya melalui jalur advokasi di tingkat multilateral dan pendekatan manajemen krisis internasional (Jiaxuan, 2009).

Setelah krisis nuklir tahun 1998, dalam krisis Kargil tahun 1999, China berubah dari yang awalnya lebih mengedepankan pendekatan multilateral menjadi bilateral, China-Pakistan dan China-India. Pertemuan bilateral terjadi dengan melibatkan banyak pemimpin dari China, India, dan Pakistan. China juga mulai

menerapkan kebijakan yang seimbang dengan menolak untuk mendukung penuh Pakistan untuk menghormati posisi India. China juga menyerukan solusi diplomatik untuk menemukan penyelesaian konflik. Memasuki abad ke-21, keamanan internasional semakin diuji. Peristiwa 9/11 merupakan kunci utama penyebab meningkatnya isu terorisme global. Hampir semua negara di berbagai kawasan saling mendeklarasikan bahwa isu terorisme mengancam keamanan nasional dan internasional. Peristiwa ini juga memberikan dampak buruk bagi penyebaran tindakan terorisme di kawasan Asia Selatan, salah satunya saat krisis tahun 2001-2002 dimana China secara aktif meminta kepada India dan Pakistan untuk mengupayakan resolusi. China semakin aktif dalam perannya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Selatan tatkala China melakukan *bilateral shuttle diplomacy* terutama setelah krisis Mumbai di tahun 2008. China mengirimkan Wakil Menteri Luar Negerinya, He Yafei untuk melakukan upaya diplomasi dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke Islamabad di akhir tahun 2008, dan New Delhi di awal tahun 2009 (People's Republic of China Embassy in India, 2009) untuk mengupayakan prinsip pentingnya perdamaian dan dalam rangka mengkampanyekan perlawanan terhadap terorisme.

Hingga di kepemimpinan Xi Jinping, China masih meneruskan perannya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Selatan. Dengan terjaminnya keamanan dan stabilitas lingkup kawasan Asia Selatan tentu akan membawa dampak positif bagi semua pihak di berbagai bidang, baik untuk negara-negara kawasan Asia Selatan sendiri dan bagi negara-negara di luar kawasan Asia Selatan, seperti China. Xi Jinping menegaskan bahwa kawasan Asia Selatan yang damai, stabil dan sejahtera sesuai dengan kepentingan nasional China. China juga bersedia untuk bekerjasama

dalam bidang strategis dengan beberapa negara kawasan Asia Selatan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama (Rajan, 2015). Hal ini tercermin dari pidato kenegaraan Xi Jinping pada akhir tahun 2014 di India dan awal tahun 2015 di Pakistan.

Dalam pidatonya di New Delhi, Xi Jinping menegaskan bahwa China akan selalu menjalin relasi baik dengan negara-negara sekitar berdasarkan prinsip-prinsip koeksistensi damai. Selain itu, Xi Jinping juga menyampaikan bahwa China juga akan turut serta dalam menciptakan dan menjaga lingkup internasional yang aman dan damai. (Indian Council of World Affairs, 2014). Kemudian pada awal tahun 2015, di depan Parlemen Pakistan, Presiden Xi Jinping juga menyampaikan pidatonya tentang kerjasama dalam bidang strategis (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2015). Sejak resmi menjabat sebagai presiden pada akhir tahun 2012 lalu, China di bawah era Xi Jinping lebih siap untuk mengadopsi beberapa pendekatan yang bersifat kooperatif terhadap sengketa maupun konflik internasional, termasuk dalam konflik Kashmir. Era pemerintahan Xi Jinping memang merupakan era dimana China lebih menekankan aspek perdamaian. Hal ini lah yang menjadi cerminan bagi sikap China yang ingin membantu upaya penyelesaian konflik Kashmir serta membantu meningkatkan hubungan bilateral India dan Pakistan. Selanjutnya, hal ini juga akan membawa dampak positif bagi stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya kawasan Asia Selatan sendiri karena India dan Pakistan merupakan dua negara besar dan paling berpengaruh di kawasan ini.

## 4.2 Aktivitas Perekonomian China di Kawasan Asia Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi dewasa ini telah menjadi hal yang sangat diperhitungkan dalam hubungan internasional. Perekonomian negara seakan telah menjadi tolak ukur dari seberapa besar peran dan pengaruh sebuah negara dalam politik internasional. China merupakan negara dengan tingkat perekonomian kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan diprediksi akan menggeser posisi Amerika Serikat. Sejak China mengalami revolusi ekonomi pada tahun 1978 lalu, kini perekonomian China semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai sejak kepemimpinan Mao Zedong, perekonomian China sangat terpusat dengan semua output dari perekonomiannya sangat dikontrol oleh pemerintah, misalnya dalam menentukan jumlah produksi, mengawasi harga, dan alokasi sumberdaya. Tujuan mendasar dari ekonomi terpusat ini adalah untuk membuat perekonomian China mandiri. Aktivitas ekspor-impor pada saat itu terbatas, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang produksi di luar buatan China. Semua *state-controlled policies* ini seakan menciptakan banyak kemunduran dalam perekonomian China. Kemudian, sejak semua aspek dalam ekonomi dikontrol oleh pemerintah pusat, secara otomatis hal ini meniadakan mekanisme pasar untuk secara efisien mengalokasikan sumber-sumber daya, sehingga hanya sedikit sekali insentif bagi perusahaan, petani, atau pekerja lainnya untuk lebih produktif atau fokus dengan kualitas produksi mereka (Morrison, 2018, hal. 2).

Menurut statistik pemerintah China, GDP China tumbuh di persentase 6.7% dari tahun 1953 hingga 1978 dan akurasi dari angka ini sempat

menimbulkan keraguan. Namun, beberapa pihak juga berpendapat bahwa selama periode Mao, para jajaran pemerintah China, khususnya di tingkat subnasional seringkali membesar-besarkan tingkat produksi karena berbagai alasan politik. Selain itu, perekonomian China pada saat itu sebenarnya juga mengalami kemunduran, termasuk pada saat *Great Leap Forward* pada tahun 1958 hingga 1962, dimana kebijakan ini menyebabkan musibah kelapara besar dan membunuh sekitar 45 juta orang (Frank Dikotter, 2010) dan pada saat Revolusi Kebudayaan pada tahun 1966 hingga 1976 yang menyebabkan kekacauan politik dan perekonomian China. Kemudian tahun 1978, sesaat setelah kematian Mao, China memutuskan untuk merubah total perekonomiannya dengan melakukan reformasi dan mengganti sistem perekonomiannya menjadi sistem perekonomian yang berbasis perdagangan bebas atau *Free Trade*, serta membuka lebar kesempatan investasi dengan pihak Barat. China berharap perubahan sistem perekonomian ini dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup.

Dimulai pada tahun 1979, China mulai menerapkan beberapa reformasi di sektor perekonomiannya. Pemerintah pusat mulai mematok harga dan insentif kepemilikan untuk para petani yang memungkinkan bagi mereka untuk turut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Selain itu, pemerintah juga menginisiasi empat zona ekonomi di sepanjang garis pantai untuk menarik perhatian investor dari luar negeri, meningkatkan ekspor, dan memudahkan impor China terhadap produk-produk teknologi. Sebagai tambahan, pemerintah tidak lagi mengontrol perekonomian dengan memberlakukan kebijakan terpusat. Kewenangan ini kemudian diserahkan kepada pemerintah di tingkat provinsi, dimana mereka diizinkan untuk turut ambil bagian dalam perdagangan

bebas dan terbebas dari peraturan tegas negara. Kemudian dalam sektor bisnis, masyarakat juga dibebaskan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Daerah-daerah atau kota-kota yang berbatasan dengan wilayah laut juga juga dirubah menjadi kota yang terbuka dan zona pertumbuhan ekonomi dimana mereka juga dibebaskan untuk menjadi bagian dari perdagangan bebas dan memberlakukan pajak. Tak hanya itu, harga yang secara ketat ditetapkan oleh pemerintah secara bertahap dihapuskan. Selama masa reformasi hingga kini pun, liberalisasi ekonomi China menjadi kunci sukses perekonomian China meskipun dalam sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem satu partai yaitu PKC (Morrison, 2018, hal. 5).

Sejak memberlakukan reformasi ekonomi, total GDP China dari tahun 1979-2016 rata-rata berkisar di angka 9.6%. GDP China tertinggi berada di tahun 1983 yaitu menembus angka 15.2%. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi China sempat mengalami penurunan di akhir dekade 1980-an akibat dari peristiwa Tiananmen. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan beberapa sanksi internasional dari beberapa negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. GDP China pun jatuh dari 11.3% di tahun 1988 menjadi 4.1% di tahun berikutnya dan menetap pada 3.8% di tahun 1990. Tahun 1991, reformasi perekonomian China kembali diteruskan dan sanksi-sanksi internasional mulai dicabut. Hingga tahun 2007, GDP China berada di angka 14.2%. Tahun berikutnya, ketika terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008, perekonomian kembali mengalami penurunan drastis dan memberikan dampak yang cukup serius bagi China. Kemudian, tahun 2008 hingga tahun 2010, GDP China tumbuh di angka rata-rata 9.7%. Hingga tahun 2017, GDP China berada di angka 6.8%.

Sejak pemerintahan Xi Jinping, sektor perekonomian menjadi prioritas, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Sejak mengalami reformasi ekonomi, China kini semakin banyak menjalin kerjasama dengan berbagai negara di beberapa kawasan. Untuk kawasan Asia Selatan sendiri, tercatat angka perdagangan China mengalami peningkatan sejak awal kepemimpinan Xi Jinping dengan partner dagang terbesar China di kawasan ini yaitu India dan Pakistan.

**Tabel 4.1.**  
**Perdagangan China dengan India (US\$ Milyar)**

INDIA					
Tahun	Ekspor	Impor	Total	G%	T.B
2010	40.91	20.84	61.75	-	+20.07
2011	50.53	23.37	73.90	19.67%	+27.16
2012	47.67	18.79	66.46	-10.06%	+28.88
2013	48.43	16.97	65.40	-1.59%	+31.46
2014	54.22	16.35	70.57	7.90%	+37.87

**Tabel 4.2.**  
**Perdagangan China dengan Pakistan (US\$ Milyar)**

PAKISTAN					
Tahun	Ekspor	Impor	Total	G%	T.B
2010	6.93	1.73	8.66	-	+5.2
2011	8.43	2.11	10.54	21.70%	+6.32
2012	9.27	3.14	12.41	17.74%	+6.13
2013	11.01	3.19	14.2	14.42%	+7.82
2014	13.24	2.75	15.99	12.60%	+10.49

Sumber: UN COMTRADE, pada <http://comtrade.un.org/db/> dalam *China's Transition Under Xi Jinping*

Menurut data statistik perdagangan China dengan India dan Pakistan sepanjang tahun 2010 hingga 2014 di atas, sektor ekspor dan impor China berada di



angka-angka yang fluktuatif namun dengan selisih angka yang sangat tipis dengan angka ekspor China yang terus meningkat dan impor China yang semakin menurun. Hal ini membuktikan bahwa volume perdagangan China dengan India dan Pakistan semakin meningkat dan menjadikan China sebagai partner perdagangan terbesar bagi keduanya.

Hingga tahun 2017, menurut data dari *Chinese General Administration of Customs*, perdagangan bilateral China dan India mencapai angka US\$84,44 milyar dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah 18,63%. Angka ini terdiri dari impor China dari India sebesar US\$16,34 milyar dan ekspor China ke India sebesar US\$ 68,10 milyar (Pande, 2018). Sedangkan untuk sektor perdagangan bilateral China dan Pakistan, menurut data statistik dari Pakistan, di tahun 2017 China menjadi partner dagang terbesar selama empat tahun berturut-turut sebagai importir terbesar bagi Pakistan dan menjadi destinasi ekspor ketiga terbesar bagi Pakistan. Total perdagangan bilateral China-Pakistan mencapai angka US\$13,2 milyar. Selain itu, menurut data dari kementerian perdagangan China, di akhir tahun 2017 Pakistan menjadi destinasi investasi terbesar China di kawasan Asia Selatan dengan nilai investasi China mencapai angka US\$5,71 milyar. Sedangkan menurut data statistik dari Pakistan, investasi China di tahun fiskal 2017-2018 mencapai US\$1,585 juta atau sekitar 57,3% total investasi asing yang masuk ke Pakistan selama lima tahun berturut-turut (Ministry of Commerce People's Republic of China, 2018)

Dalam sektor investasi dan pembangunan, salah satu prioritas utama China di kawasan ini adalah kerangka kerjasama ekonomi yang bernama *Belt and Road Initiative*. Kerangka kerjasama ini termasuk di dalamnya terdapat *Silk Road Economic Belt* di jalur

darat dan *Maritime Silk Road* di jalur laut dan mulai diinisiasi sejak akhir tahun 2013 dalam rangka mempromosikan *People-to-People Friendship* dan menciptakan masa depan yang lebih baik (Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, 2013). *Silk Road* atau Jalur Sutera merujuk pada jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui wilayah kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat. Mega proyek ini akan membangun jaringan jalan raya, jalur rel kreta, jalur-jalur pipa energi, dan telekomunikasi. Inisiasi ini untuk mengintegrasikan negara-negara yang berada di jalur sutera tersebut untuk mencapai kawasan perekonomian yang maju. Setidaknya ada empat obyek politik dan ekonomi dibalik proyek BRI.

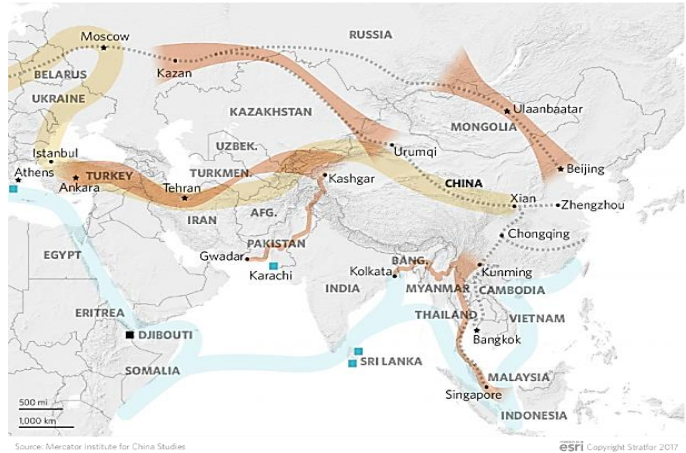
*Pertama*, China ingin membangun sistem regional atas kepemimpinan China yang mana hal ini akan mempromosikan hubungan erat China dan negara-negara tetangga. *Kedua*, BRI akan meningkatkan jaringan infrastruktur dan telekomunikasi di kawasan Asia dalam rangka memfasilitasi integrasi ekonomi. *Ketiga*, BRI akan menjadi media bagi perusahaan-perusahaan China untuk melakukan investasi. *Keempat*, proyek BRI merupakan sebuah inisiasi yang sekaligus menjadi tantangan untuk raksasa ekonomi-politik dunia saat ini yaitu Amerika Serikat (Kaura, 2018).

**Gambar 4.1**  
**Peta Jalur Belt and Road Initiative**

**China's Belt and Road Initiative**

The massive connectivity initiative, first unveiled in 2013, combines China's long-standing visions for the Maritime Silk Road and Silk Road Economic Belt, targeting 64 countries and 15 Chinese provinces for transportation, energy and trade projects.

-  Economic corridor
-  Silk Road economic belt
-  Maritime Silk Road
-  Railroad
-  Port
-  Naval base



Source: <https://worldview.stratfor.com/article/south-asia-bump-belt-and-road>

Proyek terpenting BRI di kawasan Asia Selatan adalah *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). CPEC merupakan sebuah koridor kerjasama ekonomi China dan Pakistan dalam proyek energi, jalur transportasi, infrastruktur, dan zona perekonomian dengan Pakistan (Shah, *China's Xi Jinping Launches Investment Deal in Pakistan*, 2015 ). Koridor ekonomi ini merupakan bagian dari BRI dan mencakup *Silk Road Economic Belt* dan *Maritime Silk Road* dengan total investasi sebesar US\$46 milyar. CPEC secara strategis menghubungkan kota Kashgar di provinsi Xinjiang dengan Gwadar Port di Balochistan, Pakistan. Rute ini akan memudahkan penyaluran barang dan jasa antara China dan Pakistan serta memberikan akses bagi

China menuju kawasan Timur Tengah melalui Gwadar Port menuju Laut Arab. Sedangkan komponen utama dalam CPEC adalah sektor energi. Sebanyak US\$33 milyar atau 72% dari total investasi dalam proyek CPEC yaitu sebesar US\$46 milyar digunakan untuk membangun sektor-sektor energi (Malik A. R., 2015). Lebih lanjut, sebanyak US\$2.5 milyar akan ditambahkan sebagai keperluan konstruksi jalur pipa *Liquefied Natural Gas* (LNGs) dari Iran ke Nawabshah (Sindh) dan Gwadar (Balochistan) (Shah, China to Build Pipeline from Iran to Pakistan, 2015).

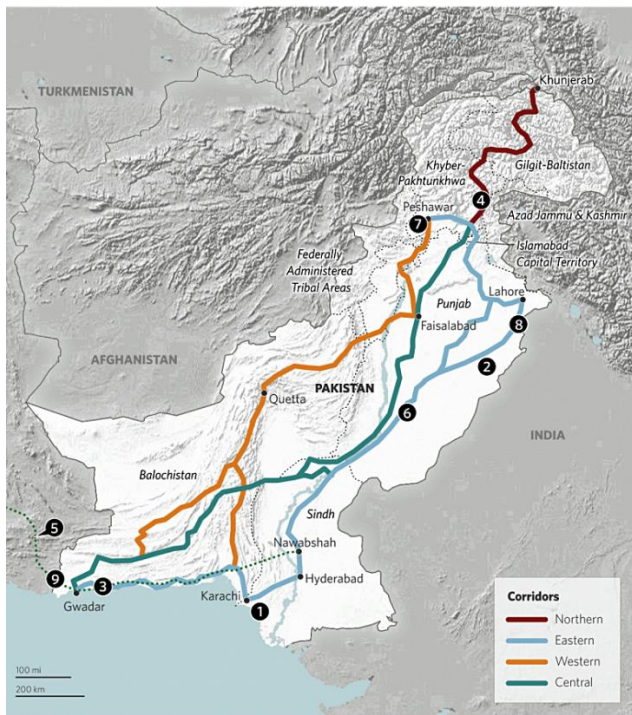
Komponen penting lainnya dalam proyek CPEC adalah jaringan transportasi. Secara spesifik, sebanyak US\$11 milyar atau sekitar 24% dari total US\$46 milyar jumlah investasi akan dialokasikan ke infrastruktur transportasi termasuk proyek jalan raya dan jalur rel kereta seperti konstruksi jalan raya sepanjang 1.100 km yang menghubungkan kota Karachi (Sindh) dengan Lahore (Punjab) dan Karakorum Highway antara Rawalpindi dan Kashgar serta jalur rel kereta Karachi-Peshawar. Nama-nama seperti *EXIM Bank*, *China Development Bank*, dan *Industrial and Commercial Bank of China* adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini.

## Gambar 4.2

### Peta Jalur CPEC

#### China-Pakistan Economic Corridor

The China-Pakistan Economic Corridor comprises more than 35 energy and infrastructure projects. Of its \$46 billion price tag, \$34 billion will go to energy projects and \$12 billion will go to infrastructure projects.



#### SELECTED PROJECTS

Energy	Cost
1 Port Qasim Coal-Fired Power Plant	\$1.9 billion
2 Sahiwal Coal-Fired Power Plant	\$1.6 billion
3 Gwadar Coal Power Project	\$360 million
4 Suki Kinari Hydropower Station	\$1.8 billion
5 Pakistan-Iran Pipeline	\$7 billion

Infrastructure	Cost
6 Peshawar-Karachi Motorway (Multan-Sukkur section)	\$2.6 billion
7 Karakoram Highway Phase 2 (Raikot - Islamabad section)	\$3.5 billion
8 ML-1 Railway Project	\$3.7 billion
9 Gwadar International Airport	\$230 million

Source: pcc.gov.pk

Copyright Stratix 2017

Sumber: <https://worldview.stratfor.com/article/south-asia-bump-belt-and-road>

Sejak menjadi bagian dari BRI, CPEC memegang peran penting dalam mempromosikan konektivitas kawasan Eurasia dimana hal ini selanjutnya akan sejalan dengan pembentukan *Special Economic Zones* (SEZs). Kebijakan *Market-Oriented* dan langkah-langkah pemerintah juga akan melengkapi dan mempercepat pembentukan of SEZ. Pembentukan *Free Trade Zone* (FTZ) di Gwadar Port juga akan serupa dengan zona FTZ di Hong Kong dan Shanghai yang telah menjadi contoh dari diterapkannya kebijakan *market-oriented*. Keterlibatan dari *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai badan perencana ekonomi terbaik China dalam diskusi mengenai proyek pelabuhan Gwadar untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sekali lagi menggarisbawahi tekad China untuk menempatkan aspek perekonomian dalam CPEC (Cong, 2015). Namun, dibalik ambisius dan besarnya nilai investasi dalam BRI dan khususnya CPEC, inisiasi dan proyek ini mendapat respon yang kurang baik dari India, terutama dalam proyek CPEC. India selalu menolak untuk bergabung dalam kerangka kerjasama BRI dan menyatakan bahwa BRI merupakan salah satu usaha China untuk memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara yang tergabung di dalamnya. Tak hanya itu, India juga menolak program CPEC karena proyek ini melewati Gilgit-Baltistan dimana wilayah ini merupakan wilayah yang masih dipersengketakan dalam konflik Kashmir dan menganggap bahwa wilayah Gilgit-Baltistan adalah bagian integral dari India (Hailin, 2016). Maka dari itu, sikap China yang ingin membantu India dan Pakistan dalam menyelesaikan konflik Kashmir agar wilayah yang dilewati oleh proyek CPEC bisa terealisasi dengan baik.

